

MENKAKAJI ULANG KONSEP KEWARGANEGARAAN, KEBANGSAAN, DAN ETNISITAS

Haryo Ksatrio Utomo, M. IP
Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Bung Karno

haryoksatrioutomo@ubk.ac.id

Abstract

This article discusses the theoretical discourse of political identity. The discussion of the article focuses specifically on citizenship, nationality, and ethnicity. These three things limit this article for two reasons. First, social conflicts are often closely related to claims of "authenticity" of symbols of citizenship, nationality, and ethnicity. These three things are often understood as one unit, even though the three actually have conceptual differences. Then, these claims can lead to sharp social conflicts. Second, an understanding of the three provides a deep understanding of the potential conflicts that occur and the appropriate conflict resolution solutions. A comprehensive understanding of the causes of conflict can also avoid the possibility of incorrect application of conflict resolution.

Keywords: Political Identity, Ethnicity, Citizens

Abstrak

Artikei ini membahas diskursus teoritis identitas politik. Pembahasan artikel tersebut memfokuskan perhatian secara spesifik mengenai kewarganegaraan, kebangsaan, dan etnisitas. Ketiga hal tersebut menjadi pembatas artikel ini dengan dua alasan. Pertama, konflik sosial sebenarnya sering berkaitan erat mengenai klaim "keaslian" dari simbol kewarganegaraan, kebangsaan, dan etnisitas. Ketiga hal tersebut sering dipahami sebagai satu kesatuan, padahal ketiganya sebenarnya memiliki perbedaan konseptual. Kemudian, klaim tersebut dapat menyebabkan konflik sosial yang tajam. Kedua, pemahaman atas ketiga tersebut memberikan pemahaman yang mendalam mengenai potensi konflik yang terjadi dan solusi penanganan konflik yang tepat. Pemahaman yang komprehensif atas penyebab konflik juga bisa menghindari kemungkinan penerapan resolusi konflik yang keliru.

Kata Kunci: Identitas Politik, Etnis, Warga Negara

PENDAHULUAN

Konflik dan resolusi konflik menjadi tema penting dalam ilmu politik sebab itu berkaitan dengan tiga hal. Pertama, kenyataan konflik yang tidak terkendali dapat merusak kestabilan dan kedamaian yang ada dalam masyarakat. Kedua, konflik sosial dan politik dapat menghancurkan eksistensi negara dan bangsa. Ketiga, konflik bisa diatasi dengan resolusi konflik baik sebagai proses kuratif terhadap konflik maupun sebagai proses preventif terhadap konflik. Ketiga hal tersebut sebenarnya menunjukkan konflik sebagai

fenomena sosial dan politik sangat perlu diantisipasi melalui serangkaian pemahaman atas konflik, termasuk penyebab konflik tersebut. Penyebab konflik itu sendiri sangat beragam, mulai dari perbedaan ideologis, kesenjangan ekonomi, hingga tingginya perbedaan masyarakat dalam suatu negara, atau dengan kata lain, kuatnya potensi konflik identitas politik.

Identitas politik menjadi inti dari pembahasan artikel ini, hanya saja pembahasan artikel tersebut memfokuskan perhatian secara spesifik mengenai kewarganegaraan, kebangsaan, dan etnisitas. Ketiga hal tersebut menjadi pembatas artikel ini dengan dua alasan. Pertama, konflik sosial sebenarnya sering berkaitan erat mengenai klaim "keaslian" dari simbol kewarganegaraan, kebangsaan, dan etnisitas. Ketiga hal tersebut sering dipahami sebagai satu kesatuan, padahal ketiganya sebenarnya memiliki perbedaan konseptual. Kemudian, klaim tersebut dapat menyebabkan konflik sosial yang tajam. Kedua, pemahaman atas ketiga tersebut memberikan pemahaman yang mendalam mengenai potensi konflik yang terjadi dan solusi penanganan konflik yang tepat. Pemahaman yang komprehensif atas penyebab konflik juga bisa menghindari kemungkinan penerapan resolusi konflik yang keliru.

MEMPERKENALKAN GAGASAN BARU

Essai pada bagian pertama akan membahas mengenai konstruksi konsep-konsep terkait dengan tema essai. Pembahasan konsep menjadi sangat penting sebab konsep akan menentukan sasaran maupun batasan yang menjadi obyek kajian. Pembahasan konsep akan membantu pemahaman atas sebuah fenomena politik secara lebih mendalam dan komprehensif. TK. Ommen menyakini bahwa ada tiga alasan penting terkait redefinisi konsep. Pertama, penggunaan konsep keliru akan menghasilkan analisa yang keliru. Konsep yang bertujuan beda akan keliru untuk menjelaskan fenomena tertentu. Kedua, definisi konsep selalu mengalami perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan spesifik. Ketiga, perubahan konsep sangat tergantung oleh situasi tertentu. Pemahaman konsep akan mempermudah analisa terhadap perbedaan identitas dalam masyarakat plural. Masyarakat plural sering membuat analisa terhadap perbedaan ketiga konsep tersebut menjadi hal yang sulit (Ommen 2009: 5-6).

Pembedaan atas ketiga konsep menjadi kesulitan tersendiri sebab itu sering mengalami proses generalisasi dengan satu sudut pandang, yaitu sudut pandang negara barat yang menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui kolonialisme. Kolonialisme menyebabkan wilayah-wilayah berbeda yang sebenarnya telah memiliki kebudayaan dan kebangsaan berbeda menjadi satu kesatuan negara yang sama, sehingga itu mengalami proses homogenisasi. Redefinisi baru terjadi dengan mempertimbangkan

dampak kolonialisme yang membagi dunia menjadi dua kategorisasi. Pertama, kategorisasi dunia menjadi tiga zonasi, yaitu dunia pertama yang berisi Eropa Barat dan Amerika Utara, dunia kedua yang terdiri dari Amerika Latin, dan dunia ketiga yang berisi mayoritas negara Asia dan Afrika. Kedua, pembagian dunia menjadi dua kurun waktu peradaban, yaitu dunia lama yang terdiri dari Eropa dan sebagian Asia seperti Jepang dan China, dan dunia baru yang terdiri Amerika Serikat, Indonesia, dan sebagainya (Ommen 2009: 8-9).

Kategorisasi tersebut tentunya tetap harus dikritisi lebih lanjut. Istilah dunia baru dan lama atau dunia kedua dan ketiga sebenarnya lebih berkaitan dengan konstruksi sistem kolonialisme terhadap wilayah jajahan. Dunia baru sebenarnya merujuk dunia yang dibentuk oleh negara penjajah. Dunia baru atau negara dunia ketiga merupakan penamaan terhadap penggabungan dua atau lebih wilayah independen dalam satu entitas kekuasaan baru oleh negara kolonial, dan itu bermakna dunia baru tidak sepenuhnya baru, melainkan itu dunia lama yang memiliki peradannya sendiri. Kemudian, istilah dunia baru juga bisa merupakan hasil migrasi dari negara Eropa ke tanah jajahan, dan proses pengolonisasian tersebut meminggirkan masyarakat dunia lama. Pada saat pendatang dari Eropa menguasai negara baru, maka warga dunia baru pun menggunakan istilah bangsa bagi pendatang, dan menurut Ommen, istilah bangsa tersebut menjadi tidak benar (Ommen 2009: 17).

Ray (2012) melihat bahwa istilah dunia ketiga terjadi pada masa perang dingin. Perang dingin kemudian menempatkan negara-negara pemenang perang dunia sebagai penentu aturan internasional, termasuk membagi dunia dalam tiga bagian. Kemudian, negara-negara barat membangun jaringan patron dan klien yang bertahan di berbagai negara pasca kolonial. Istilah dunia ketiga kemudian berkembang sebagai kekuatan regional baru yang berusaha membentuk paradigma dunia ketiga untuk meningkatkan daya tawar negara dunia ketiga terhadap negara maju (Chaudhuri 1986). Istilah dunia ketiga pada akhirnya memang mencerminkan diskriminasi regional oleh negara penjajah (Rieff 1989).

Pemaksaan istilah oleh negara barat menjadi problematika tersendiri pada saat muncul sikap paradoks dari Eropa kepada negara dunia ketiga. Sikap paradoks negara barat terjadi saat negara dunia baru yang berada di dunia ketiga menyatakan kemerdekaannya dengan penilaian negatif, misalnya balkanisasi, kantonisasi, dan sebagainya. Sikap berbeda ditunjukkan kepada negara-negara dunia baru yang berada dalam negara dunia pertama yang mengajukan tuntutan sama, namun itu justru menunjukkan dukungan penuh. Ommem melihat itu sebagai ketidakadilan sebab keduanya sama-sama merupakan wujud penentuan hak mandiri yang bebas dari penjajahan. Ketidakadilan berlanjut dengan persepsi negara baru di luar Eropa sebagai sebuah entitas negara dunia ketiga dan memiliki ketertinggalan, padahal negara

dunia ketiga pun memiliki khazanah kebudayaan tersendiri, namun itu semua diabaikan oleh negara barat (Ommen 2009: 18-19).

Satu tema penting yang perlu ditinjau ulang adalah mengenai etnifikasi, yaitu sebuah proses yang menghubungkan asas teritori dengan budaya, dan relasi tersebut bisa mempengaruhi eksistensi sebuah bangsa. Etnifikasi memiliki enam bentuk. Pertama, sebuah bangsa yang bertahan dalam tanah moyangnya, namun itu mengalami proses etnifikasi oleh kolonial dengan tiga varian, yaitu marjinalisasi penduduk asli dalam dunia baru, labelisasi sebuah komunitas tanpa keterikatan teritorial, dan pemecahan satu simbol etnis dalam banyak wilayah oleh nenek moyang, seperti yang terjadi di Xinjiang, China yang diklaim oleh RRC sebagai bagian dari Dinasti Qing (Clarke 2013). Kedua, pemblokiran partisipasi dan birokrasi terhadap imigran yang menjadi warga negara baru, misalnya warga Jerman keturunan Yahudi disangkal oleh NAZI. Ketiga, identifikasi diri sebagai bagian tanah air lampau sekalipun telah menempati wilayah baru dalam waktu lama, misalnya istilah Afrika-Amerika. Keempat, penyatuan bangsa beragam dalam satu entitas kolonial. Kelima, hak kewarganegaraan dan kemanusiaan kaum migran tidak diakui oleh wilayah baru. Terakhir, para migran yang sebenarnya diakui sebagai warga negara baru ternyata ingin kembali ke asal (Ommen 2009: 20-22).

Etnifikasi sebagai proses pemisahan atau pembentukan simbol etnis baru berbeda dengan nasionalisasi merupakan proses adanya kesamaan ikatan nenek moyang, misalnya seseorang keturunan Jerman mengakui dirinya sebagai bangsa Jerman, maka ia diakui sebagai warga nasional Jerman, dan saat ia kembali ke Jerman akan memperoleh kewarganegaraan Jerman. Kondisi berbeda dapat terjadi saat seorang migran bersedia untuk melepaskan keterikatan dengan tanah air lama, dan bersedia untuk menerima identitas dan norma-norma baru dari dunia baru, maka ia akan menjadi warga nasional negara baru. Nasionalisasi sebagai konsep jelas berbeda dengan etnifikasi sebab nasionalisasi mencerminkan proses integrasi seseorang dengan tanah baru, dan migran bersedia menjadi warga nasional negara baru tersebut (Ommen 2009: 25-27). Pemahaman atas perbedaan konsep menjadi alasan perlunya rekonseptualisasi gagasan lama, dan rekonseptualisasi ini menjadi bahasan bagian berikut.

MENGAJI ULANG KONSEP KEWARGANEGARAAN, KEBANGSAAN, DAN ETNISITAS

Pemahaman atas ketiga konsep tersebut menjadi penting dengan mengembalikan ketiga diskursus tersebut sesuai dengan akar dasar konsep, yaitu negara, bangsa, dan etnis. Pemahaman terhadap akar konsep menjadi penting sebab itu semua saling berkaitan satu sama lain. Negara memiliki simbolisasi

identitas warga negara, bangsa menyimbolisasi dalam wujud kebangsaan, dan etnis menjadi simbol lebih besar, yaitu etnisitas. Korelasi akar dengan konsep besar menjadi alasan esai ini akan mengelaborasi makna atau definisi dari ketiga akar tersebut, dengan pembahasan pertama adalah mengenai negara.

Negara merupakan instrumen yang memiliki kedaulatan politik atas suatu teritorial yang jelas dan hak monopoli terhadap kekuatan yang sah, dan memiliki warga yang memiliki kesetiaan yang bulat kepada negara. Kesetiaan yang bulat yang bulat menyebabkan adanya kepatuhan terhadap hukum nasional tanpa harus mengabaikan keberadaan hukum-hukum komunitas. Negara dalam konteks berbeda bisa menerima kedaulatan hukum yang berasal dari komunitas, bangsa, atau wilayah, misalnya hukum negara bagian di AS, namun hukum nasional tetap menjadi pijakan utamanya. Negara menjadi sebuah kolektivitas warga negara dengan satu simbol identitas sipil, politik, dan sosial yang spesifik. Negara memberikan status kewarganegaraan, yaitu keanggotaan politik individu untuk terlibat dalam berbagai aktivitas politik, dan status tersebut untuk individu yang loyal terhadap negara (Ommen 2009: 36-43).

Sementara itu, bangsa merupakan komunitas dengan karakteristik tertentu dan negara menjadi alat untuk melindungi identitas kulturalnya. Istilah bangsa berkaitan dengan nasionalisme yaitu sebuah proses pembentukan simbol bangsa, dan nasionalisme dapat bermakna negatif bagi bangsa kolonial sebagai ancaman terhadap kekuasaan kolonial dan nasionalisme bernilai positif sebab itu menjadi simbol pergerakan komunitas terhadap kekuatan penjajahan. Nasionalisme memang bisa menjadi kerumitan tersendiri dalam konteks negara jajahan sebab nasionalisme menjadi ancaman bagi kekuasaan bangsa dominan, namun itu juga menjadi simbol harapan bagi bangsa tidak dominan untuk meraih kemerdekaan (Ommen 2009: 44-45).

Nasionalisme sebenarnya menurut Ommen memiliki perbedaan makna simbolik antara negara lama dan negara baru. Negara lama menjadikan nasionalisme sebagai penegasan homogenitas bangsa atas dasar kesamaan kultural yang menjadi dominan dalam negara tersebut, misalnya Perancis yang memiliki kesamaan kultural dominan, yaitu Galilea, Bangsa Jepang yang diikat oleh kesamaan akar budaya Jepang, dan sebagainya. Sementara itu, nasionalisme bagi negara dunia ketiga atau dunia baru menjadi identitas politik yang membedakan antara negara penjajah dengan negara merdeka. Nasionalisme dalam negara baru sebenarnya tidak berakar pada satu bangsa atau satu budaya dominan, melainkan itu membentuk satu identitas politik nasional yang menyatukan berbagai bangsa berbeda. Nasionalisme negara baru menjadi unik sebab itu terkadang membentuk satu simbol bangsa buatan dan menurunkan kedudukan bangsa beragam sebagai suku bangsa, dan hal itu terjadi di Indonesia. Nasionalisme negara

baru tersebut akan mengangkat satu simbol bangsa nasional yang dominan sebagai fondasi pembentukan negara nasional (Ommen 2009: 46-54).

Nasionalisme bisa saja berkelidat dengan simbol agama dan ras, sehingga itu bisa menyebabkan konflik politik yang bersifat regional atau justru memecah satu negara menjadi dua negara (Banton 2000). Konflik antara Israel dan Palestina bisa menjadi contoh konflik teritorial yang terjadi sebagai dampak intervensi Inggris yang berdampak pemisahan dua negara, serta itu menimbulkan konflik antara Arab dan Israel. Fenomena lain terjadi dalam wujud pemisahan antara India dan Pakistan yang bermula dari konflik agama dan etnis. Konflik tersebut masih terjadi hingga saat ini dalam perebutan wilayah Khasmir (Carment 1993). Konflik Khasmir sebenarnya menempatkan situasi India dan Pakistan dalam posisi dilematis. Khasmir menjadi kebutuhan Pakistan sebab itu akan melengkapinya eksistensi Pakistan. Sementara itu, India membutuhkan Khasmir untuk menegaskan simbolisasi India sebagai negara sekuler dan menjaga loyalitas komunitas Islam terhadap India (Oldenburg 2011).

Kemudian, etnis perlu dikaji secara mendalam. Essai ini perlu membahas lima konseptualisasi etnis dan etnisitas. Pertama, kelompok etnis dikonseptualisasi sebagai sesuatu yang kecil sebagai dampak dari pengaruh-pengaruh asing. Pengaruh-pengaruh asing menyebabkan etnisitas sebagai gambaran identifikasi identitas nenek moyang menghilang. Kedua, kelompok etnis merupakan kelompok yang berwenang untuk mengidentifikasi dirinya sendiri atas dasar faktor kultural dasar yang berasal dari masa lalu maupun masa kini, dan faktor kultural akan menjadi simbol pemersatu relasi sosiokultural bagi para anggotanya. Ketiga, kelompok etnis merupakan kelompok yang memanfaatkan simbol agama, ras, dan bahasanya sebagai strategi untuk memperoleh manfaat dari negara kesejahteraan. Keempat, etnisitas merupakan instrumen pencarian identitas bagi individu atau kelompok yang memiliki identitas kultural beragam. Kelima, etnisitas merupakan alat untuk mencari kesatuan psikologis atas dasar kesamaan tertentu, baik secara nyata maupun fiksi (Ommen 2009: 55-56).

Ommen melihat bahwa ketiga konsep tersebut merupakan simbol identitas yang berbeda. Kewarganegaraan sebenarnya merupakan simbol identitas yang berasal dari negara kepada warganya dengan prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan menempatkan setiap warga memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang ada dalam negara tersebut, dan itu melekat dengan undang-undang dasar dan undang-undang atau konvensi turunan dari undang-undang tersebut. Kebangsaan dan etnisitas bisa menjadi simbol yang positif pada saat itu mendukung prinsip kesetaraan dan menjadi simbol negatif yang menolak prinsip penyeragaman. Etnisitas sendiri bagi Ommen memiliki dua simbol etnisitas, yaitu

etnisitas material yang muncul sebagai respon terhadap keterpinggiran material dan etnisitas simbolis yang hadir sebagai respon terhadap potensi ancaman bagi simbol kultural tertentu.

Etnisitas sebagai konsep pun perlu mempertimbangkan itu sebagai respon terhadap kolonialisme (Ommen 2009: 59-60). Kolonisasi menurut Ommen memiliki tiga varian. Pertama, kekuasaan kolonial menarik diri dari sebuah tanah jajahan sebagai akibat kemunculan gerakan nasionalisme, dan fenomena tersebut terjadi di sebagian besar Asia dan Afrika, termasuk Indonesia. Kedua, kolonisasi berubah menjadi relasi yang saling berdampingan antara warga asli dengan warga pendatang, seperti di kawasan Amerika Latin. Ketiga, kolonisasi yang melenyapkan mayoritas bangsa Asli dan menggantikannya dengan bangsa pendatang, namun bangsa pendatang melakukan perlawanan terhadap negara asal untuk memisahkan diri sebagai negara baru, seperti di Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi contoh unik sebab kaum migran menggunakan kekuatan perangnya untuk menyingkirkan bangsa asli, kemudian bangsa migran melawan negara asal dan membentuk negara Amerika Serikat. Pembentukan negara Amerika Serikat sendiri menjadi dua hal ironi sebab pasca pembentukan negara tersebut, yaitu Amerika masih mengakui keterhubungan kultural dengan negara asal, dan Amerika Serikat menerapkan prinsip keterbukaan etnisitas bangsa pendatang (Ommen 2009: 61-64).

Satu tema menarik yang diangkat oleh Ommen adalah kolonialisme internal. Kolonialisme internal dilakukan oleh bangsa dominan terhadap bangsa minoritas. Kolonialisme internal akan menjadikan satu hukum nasional yang mengabaikan dimensi pluralis. Kolonialisme internal juga bisa saja dilakukan sebagai bagian kontrol terhadap wilayah lokal dengan tujuan meminggirkan identitas bangsa asli (Ommen 2009: 64-65), seperti Cina yang masih meminggirkan Tibet, dengan Tibet yang awalnya negara mandiri dikolonisasi oleh China. Contoh lain adalah peminggiran hak bangsa Pattani di Thailand Selatan oleh pemerintahan Thailand. Kolonialisme internal bisa saja nantinya memunculkan gerakan-gerakan nasionalisme yang bagi pemerintahan dominan sebagai gerakan separatisme.

Pembahasan ketiga hal di atas menurut Ommen perlu dicermati kembali. Ommen kembali menjelaskan kembali mengenai konsep etnis, bangsa, dan negara. Etnis merupakan simbol kolektivitas yang anggotanya memiliki kesamaan gaya hidup, sejarah, dan bahasa, namun identifikasi terhadap tanah air asal melemah dan mulai menghilang. Etnisitas merupakan proses tarik menarik antara teritori dan budaya. Etnis yang berhasil mengklaim teritori dan menjadikannya sebagai tanah air, maka etnis akan menjadi bangsa, yaitu gabungan emosional sebagai satu identitas nasional. Bangsa yang berhasil membangun serangkaian klaim sosial, budaya, dan politik terhadap teritori akan menjadi negara bangsa. Kemudian, bangsa-bangsa berbeda menyepakati satu simbol identitas nasional yang menjamin

persamaan hak dan kewajiban secara hukum, maka itu akan membentuk kewarganegaraan (Ommen 2009: 69-70).

Istilah kebangsaan jika merujuk dokumen-dokumen internasional selalu merujuk kata warga negara yang menjadi simbol nasionalitas, hanya saja istilah tersebut memunculkan persoalan tersendiri saat seseorang dengan satu tanda nasional menjadi warga negara berbagai negara berbeda. Kewarganegaraan bisa juga terjadi dalam satu identitas nasional, yaitu satu kewarganegaraan nasional dengan perbedaan bangsa, misalnya kewarganegaraan Inggris yang menyatukan bangsa Skotlandia, Wales, dan Irlandia. Kewarganegaraan dalam satu negara nasional pun bisa merupakan gabungan kewarganegaraan federal dan kewarganegaraan dari negara bagian. Ommen mengusulkan ide bangsa sebagai kumpulan orang atas dasar kesatuan sosial yang membentuk bangsa selama mereka memiliki teritori, yang jika diformalkan akan menjadi negara, namun jika kumpulan orang gagal menguasai teritori, maka itu menjadi etnis (Ommen 2009: 71-79).

Kemudian, Ommen menawarkan lima premis untuk menengahi ketegangan konsep antara kebangsaan dan etnisitas. Pertama, semua tanah air baik yang berasal dari nenek moyang maupun hasil adopsi bersifat nasional. Kedua, etnis tidak memiliki tanah air sebab etnisitas berasal dari multinasional. Keempat, tanah air nasional yang sama dapat dipecah dalam dua atau lebih banyak negara, seperti Basque di Spanyol. Kelima, sebagian besar negara memiliki kelompok etnis yang bisa saja mengakui sebuah teritori lokal, atau tidak mengakui wilayah, atau mengklaim memiliki wilayah tertentu, namun klaim itu tertolak secara politik. Etnisitas bisa menjadi bangsa dengan dua ketentuan, yaitu etnis tersebut mengklaim teritori sebagai tanah air dan penduduk asli yang lama di daerah tersebut bersedia menerima etnis pendatang sebagai warga nasional (Ommen 2009: 87).

Selanjutnya Ommen menyampaikan enam premis untuk membedakan ras dengan etnisitas. Pertama, konsepsi rasisme yaitu serangkaian persepsi negatif terhadap ras menyebabkan distorsi konsep ras sebagai hasil genetis menjadi sentimen ras sebagai etnisitas. Kedua, perubahan etnisitas berubah seiring dengan proses asimilasi dan akulturasi melalui pengadopsian bahasa baru, bahasa baru, dan gaya hidup baru, sementara itu tidak secara langsung terlihat meskipun ada pernikahan antarras. Ketiga, etnisitas berkaitan erat dengan perbedaan atas dasar kultur, sementara itu ras dibedakan atas dasar faktor genetis. Keempat, perbedaan kultural bisa saja mempertajam konflik antarras, misalnya konflik antara warga Kristen berkulit putih dengan warga Asia beragama Islam. Kelima, rasisme bisa berkembang menjadi sentimen kolektif pada saat kelompok ras dominan dalam suatu wilayah membangun sentimen negatif terhadap kelompok ras minoritas. Terakhir, penyatuan konsep ras dan etnis sering digunakan sebagai

proses pengaburan bahwa sebenarnya terjadi persoalan diskriminatif dan konflik dalam negara (Ommen 2009: 96-98).

KESIMPULAN

Pada bagian terakhir, artikel ini akan menyimpulkan tiga hal. Pertama, kolonisasi barat terhadap berbagai wilayah dunia menyebabkan hilangnya banyak negara dunia lama. Hilangnya sebagian besar negara dunia lama disebabkan oleh penggabungan negara-negara lama menjadi negara-negara administratif baru yang berada di bawah kekuasaan kolonial. Kekuasaan kolonial kemudian membentuk satu simbol identitas nasional dengan paksaan. Sistem kolonial tersebut bertahan lama hingga pasca kolonial. Negara-negara Barat kemudian menempatkan negara-negara pasca kolonial menjadi satu bagian dengan dunia ketiga.

Kedua, sudut pandang homogenitas dari Barat terhadap negara menimbulkan ketegangan konseptual. Negara kolonial cenderung menyamakan konsep bangsa, etnis, dan negara, padahal ketiganya merupakan hal yang berbeda. Perbedaan ketiganya ditentukan dua hal, yaitu asas teritorial yang membedakan antara etnis dengan bangsa dan asas keabsahan politik, yaitu kewarganegaraan. Ketegangan konseptual tersebut pada masa kemerdekaan menyebabkan kecurigaan antarkomunitas berbeda yang berujung pada konflik atau perpecahan satu negara menjadi negara lain.

Ketiga, kolonisasi memunculkan respon berbeda-beda dari negara terjajah. Sebagian negara memilih untuk berdamai dengan bangsa penjajah dan membentuk satu entitas negara nasional. Sebagian lain memilih untuk melakukan perlawanan terhadap negara penjajah dan membentuk negara baru. Sebagian negara yang memerdekakan diri secara ironis awalnya termasuk bagian dari kekuasaan imperialis yang menghancurkan peradaban dunia lama.

Referensi :

- Banton, Michael. 2000. *Ethnic Conflict*. *Sociology*, 34, 3: 481-498.
- Carment, David. 1993. *The International Dimensions of Ethnic Conflict: Concepts, Indicators, and Theory*. *Journal of Peace Research*, 30: 2, 137-150.
- Chaudhuri, Adhip. 1986. *A Third World Perspective*. *Harvard International Review*, 8: 5, 12-14.
- Clarke, Micheal. 2013. *Ethnic Separatism in the People's Republic of China History, Causes and Contemporary Challenges*. *European Journal of East Asian Studies*, 12: 1, 109-133.

Oldenburg. 2011. *Uneasy Neighbours*. India International Centre Quarterly, 37: 3/4, A TANGLED WEB: Jammu & Kashmir, 12-25.

Ommen, TK. 2009. *Kewarganegaraan, Kebangsaan, dan Etnisitas Mendamaikan Persaingan Identitas*. Bantul: Kreasi Wacana.

Ray, Aswini. 2012. *Reinventing the Third World*. Economic and Political Weekly, 47: 1, 36-39.

Rieff, David. 1989. *In the Third World*. Salmagundi, No. 81, 61-65.